



RENCANA KERJA

(R E N J A)

**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS TENAGA KERJA
JL. LETJEND S.PARMAN NO.17 , TELP.(0281) 891187, FAX : (0281) 894861
PURBALINGGA 53316**



RENCANA KERJA

(R E N J A)

**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS TENAGA KERJA
JL. LETJEND S.PARMAN NO.17 , TELP.(0281) 891187, FAX : (0281) 894861
PURBALINGGA 53316**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun setiap tahun. Rencana Kerja (Renja) Dinas memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunnya Renja ini dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Purbalingga, Januari 2017

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Purbalingga



Ir. GUNARTO
Pembina Utama Muda
Nip. 195909221988031004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	6
BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA PROGRAM DAN	
KEGIATAN.....	14
3.1. Isu Strategis	14
3.2. Tujuan dan Sasaran Tahun 2018.....	14
3.3. Arah Kebijakan Tahun 2018	17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2018.....	19
4.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018	19
4.1.1 Pendanaan OPD	20
4.2. Matrik Renja OPD Tahun 2018 (RKT 2018)	21
BAB V PENUTUP.....	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arah kebijakan pembangunan Purbalingga ditujukan untuk mewujudkan Visi Purbalingga yang merupakan visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA’**, dengan prioritas pembangunan penciptaan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai prinsip-prinsip good governance antara lain, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memiliki visi strategis, serta penegakkan dan pelaksanaan empat pilar pembangunan yaitu :

- a). Pembangunan kualitas manusia
- b). Pembangunan pedesaan
- c). Pembangunan ekonomi kerakyatan
- d). Penyediaan infrastruktur yang memadai

Untuk menunjang agenda pokok pembangunan tersebut harus didukung dengan penghasilan masyarakat yang memadai. Penghasilan masyarakat yang memadai akan terwujud apabila terdapat lapangan usaha ataupun lapangan usaha yang cukup serta suasana kehidupan yang nyaman dan sehat.

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalinggabertjumlah 894.062 jiwa yang terdiri dari laki laki 441.706 jiwa dan perempuan 452.356 jiwa (Purbalingga Dalam Angka 2016). Jumlah penduduk yang besar dapat dijadikan sebagai kekuatan dan modal pembangunan. Oleh karena itu usaha peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lainnya perlu dilakukan secara teliti dan terintegrasi.

Penduduk kabupaten Purbalingga yang berpotensi untuk peningkatan perekonomian di bidang ketenagakerjaan berdasarkan data Purbalingga dalam angka (BPS), Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun ke atas periode tahun 2010-2014 bersifat fluktuatif dan meningkat 52,52 % (Tahun 2013) menjadi 67,31% (Tahun 2014), dari 337.714 orang menjadi 443.845 orang. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu

jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian kabupaten Purbalingga yang pada tahun 2013 dan 2014 cukup besar yaitu 73,76 % dan & 70,95 % (BPS kabupaten Purbalingga). Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka yang merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja di kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 sebesar 5,72 % dan tahun 2014 sebesar 5,23 % (Data BPS Purbalingga).

Permasalahan yang cukup menonjol terkait dengan tingginya angka pengangguran adalah kualitas dan produktifitas tenaga kerja masih rendah, sehingga kesempatan kerja yang tersedia tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu perlu peningkatan mutu dan produktifitas bagi tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing dalam memasuki lapangan kerja atau bertransmigrasi.

Dengan demikian atas dasar permasalahan tersebut perlu disusun kebijakan program dan kegiatan yang secara bertahap dan berkesinambungan mampu mendorong secara efektif berkembangnya dunia usaha. Dan secara bersamaan pula mampu menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi jumlah masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan serta mendorong terwujudnya pemerataan pendapatan. Hal ini sejalan dengan misi kabupaten Purbalingga yang ke 5 adalah **“Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.”**

1.2 . LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinnaker Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional / SSPN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
14. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DINNAKER adalah :

1. Sebagai pedoman para pelaksana pembangunan ataupun lembaga dan stakeholder yang lain;
2. Alat pengendali dan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah secara efektif dan efisien.

Adapun Tujuannya adalah :

- a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga ataupun stakeholder yang lain;
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan ;
- d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja OPD

1.4. Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Berisi indikator beserta data capaian kinerja OPD

III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018

3.2. Sasaran Tahun 2018

3.3. Arah Kebijakan Tahun 2018

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2018

4.1. Program dan kegiatan Pembangunan Tahun 2018

4.2. Pendanaan OPD

4.3. Matrik Renja OPD Tahun 2018

V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Tenaga Kerja tahun 2016 sebagai berikut :

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

-Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

I. Program Pembinaan Peningkatan Ketrampilan dan penempatan Tenaga Kerja :

1. **Pameran Bursa Kerja** mengundang 20 Perusahaan, alokasi dana Rp. 25.012.000,- Realisasi Rp 24.552.000,- (98,16 %), sisa anggaran untuk efisiensi.

2. **Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja AKAD**, target 100 orang dengan alokasi dana Rp. 18.375.000,- Realisasi Rp. 11.956.000,- (45,39 %), ada sisa anggaran (ATK, Makan Minum Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak diambil) karena target tidak tercapai, peminat/pendaftar hanya 35 orang.

3. **Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja AKAN**, target 100 orang dengan alokasi dana Rp. 14.021.000,- Realisasi , Rp. 13.172.500,- (93,95 %) Sisa dana untuk efisiensi.

4. **Pengelolaan BLK**; Terpeliharanya dan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor guna menunjang kelancaran operasional BLK, berupa pengadaan :

- 2 buah Almari Filling
- 2 buah White Board
- 2 buah Papan Nama BLK
- 4 buah Kursi Kerja
- 50 buah Kursi Rapat
- 3 buah Meja rapat
- 4 buah Meja ½ biro
- 1 set Kursi Sofa
- 1 Unit AC
- 1 buah Mimbar
- 1 Unit Laptop
- 1 unit PC Computer + Monitor

- 1 unit Printer
- 1 unit LCD proyektor
- 1 sarana Jaringan air bersih / bak penampungan / torn
- Penambahan Daya Arus Listrik.

Alokasi dana Rp. 575.459.000,- Realisasi Rp 438.105.000,- (93,09 %).Sisa anggaran dari belanja listrik, air, telepon karena ada efisiensi pemakaian. Untuk belanja listrik pengajuan anggaran terlalu besar, perkiraan Tahun 2016 awal daya listrik sudah bertambah 33.000 VA ternyata baru diberikan di anggaran perubahan, jadi anggaran pembayaran rekening listrik sampai dengan Desember 2016 kelebihan banyak.

5. Pelatihan Bagi Calon Tenaga Kerja (DBH-CHT).

Dapat dilatih 20 Orang ketrampilan otomotif dan 20 orang Pelatihan Kewirausahaan. Alokasi dana Rp.75.000.000,- Realisasi Rp.65.366.00000,- (87,82 %),kelebihan anggaran transport.

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBH-CHT).

Terpenuhinya sarana dan prasarana BLKdengan alokasi dana Rp. 269.350.000,-yakni :

1. Pengadaan Alat Dapur untuk keperluan Pelatihan Tata Boga:

1. Kitchen set = 2 unit
2. Mixer duduk = 4 unit
3. Mixer Roti = 1 unit
4. Blender Jumbo = 2unit
5. Timbangan Digital = 3 buah
6. Pamarut Kelapa Listrik = 2 unit
7. Panci Pemanas = 4 buah
8. Water Jug = 2 buah
9. Microwave = 1 unit
10. Dandang Kukus = 4 buah
11. Gilingan Daging = 1 unit
12. Gilingan Mie = 1 unit

2. Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) untuk keperluan Pelatihan Menjahit :

1. Mesin Jahit Manual = 2 unit

2. Mesin Jahit Listrik = 6 unit
3. Mesin Obras = 2 unit
4. Mesin Wolsum / Neci = 1 unit
5. Setrika listrik = 3 buah
6. Setrika Uap = 1 buah
7. Boneka pas Wanita (dewasa) = 3 buah
8. Boneka pas Pria (dewasa) = 3 buah
9. Boneka pas Wanita (anak-anak) = 2 buah
10. Boneka pas Pria (anak-anak) = 3 buah

3. Pengadaan Peralatan Perbengkelan Sepeda Motor untuk keperluan Pelatihan Perbengkelan Sepeda Motor

1. Tool Box set = 2 set
2. Bor Tangan = 1 buah
3. Tracker set + Penahan Magnet = 2 set
4. Gerenda Tangan = 1 buah
5. Diagram Wiring/ Diagram Kelistrikan Spd Motor = 1 unit
6. Accu Charger = 1 unit
7. Timing Light Spd Motor = 2 buah
8. Motor Bike Lift = 2 unit
9. Tray / Rak mesin / alat = 2 buah
10. Alat Peraga / Praktek Pendidikan berupa 2 unit kendaraan sepeda motor Injeksi
 - 1 transmisi manual
 - 1 transmisi otomatis)

4. Pengadaan Peralatan Las untuk Pelatihan Las / Welder :

1. Mesin Las AC 160 Ah = 4 unit
2. Mesin Las DC 300 Ah = 2 unit
3. Pemotong Plat Manual = 2 buah
4. Meja Las = 2 buah
5. Tang Panas = 4 buah
6. Tabung Las Acetelin = 1 buah
7. Tabung O2 = 1 buah
8. Regulator Acetelin = 1 set

- | | |
|------------------------|----------|
| 9. Regulator O2 | = 1 set |
| 10. Tool Box set | = 2 set |
| 11. Ragum (rahang 6) | = 2 buah |
| 12. Kunci Inggris 12" | = 4 buah |
| 13. Kunci Pipa | = 4 buah |

Realisasi Rp. 266.350.000,- (98.89 %). Sisa anggaran pada pengadaan Rak Piring tidak dilaksanakan karena pada Pengadaan Kitchen set sudah terdapat rak piring di dalamnya. Serta pengadaan alat dapur berupa piring, mangkok, sendok tidak dilaksanakan karena itu bukan termasuk belanja modal.

7. Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Pabrik dengan sasaran 200 pekerja / 2 perusahaan, dengan pemeriksaan kesehatan meliputi : test paru-paru, urine, mata dan kelelahan fisik yang dilakukan oleh Hiperkes. Alokasi Dana Rp 62.871.000,-. Realisasi Rp 56.691.000,- (90,17 %). Sisa anggaran dari Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak diambil untuk efisiensi.

8. Penyelenggaraan Pelatihan di BLK (DBH-CHT), dalam rangka pemerataan kesempatan kerja mempersiapkan tenaga mandiri, BLK telah menyelenggarakan pelatihan ketrampilan yang ditujukan kepada para masyarakat purbalingga. Adapun alokasi Anggaran Rp.534.406.000,- dengan Jenis-jenis pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yakni :

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Otomotif 16 orang x 3 angkatan | = 48 orang |
| 2. Menjahit 16 orang x 3 angkatan | = 48 orang |
| 3. Las 16 orang x 3 angkatan | = 48 orang |
| 4. Tataboga 16 Orang x 5 angkatan | = 80 orang |
| Jumlah | = 224 orang |

Realisasi Anggaran Rp 531.045.800,- (99,37)

9. Bursa Kerja Khusus(BKK)

Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja yang merupakan mitra Dinas

Tenaga Kerja di mana dalam jalinan kerjasama dengan Depnakertrans tentang pelatihan (Magang) dan penempatan tamatan. Adapun Alokasi dana Rp. 9.222.000, Realisasi Rp. 9.222.000.- (100 %), kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Rapat-rapat kordinasi dengan BKK yang ada di Kabupaten Purbalingga sebanyak 25 BKK, dengan harapan:

- a. Diperolehnya data tenaga kerja yang tersalurkan;
- b. Lebih terpeliharanya Hubungan Kelembagaan Bursa Kerja Khusus.

II. **Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial**

1. **Fasilitasi Dewan Pengupahan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)**, kegiatan berupa Survey ke 3 pasar besar yakni Pasar Segamas, Pasar Bobotsari dan Pasar Bukateja, Sosialisasi UMK dan Struktur Skala Upah, Pemantauan UMK dan THR di perusahaan, Alokasi dana Rp,. 26.347.000,- Realisasi Rp. 24.431.500,- (92,73 %). Sisa anggaran dari Belanja pegawai/Honorarium tidak diambil / dicairkan karena ada personil yang pindah dan pensiun.
2. **Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja** Sasaran 64orang telah mengikuti pelatihan Mebelair, Jahit, Las, Handycraft (masing-masing 16 orang) Alokasi dana Rp 54.500.000,-. Realisasi Rp 46.888.077,-.(86,03%)
3. **Sosialisai Keselamatan dan Kesehatan Kerja/ K-3**bertujuan agar tenaga kerja bertambah pengetahuannya tentang K3 (kepesertaan BPJS) dan menghimbau kepada tiap perusahaan untuk memasang spanduk yang berkaitan dengan Bulan K3 serta pengerahan tenaga kerja sebagai peserta upacara Bulan K3 sebanyak 100 orang.Alokasi dana Rp. 6.735.000,- Realisasinya Rp. 6.735.000,- (100,00%)
4. **Pemberdayaan Sarana Hubungan Industrial**, untuk terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara unsur TRIPARTIT (Pemerintah, Apindo dan Pekerja/Perusahaan perlu diberdayakan Sarana Hubungan Industrialberupa Rakor, PenyuluhanPeraturan Perundang-undangan

Ketenagakerjaan, Pemantauan UMK dan THR. Adapun alokasi Dana Rp 29.611.000 dan Realisasi Rp 27.904.500,- (94,24 %). Sisa anggaran dari Belanja pegawai/Honorarium tidak diambil / dicairkan karena ada personil yang pindah dan pensiun

- 5. Pengawasan Tenaga Kerja AKAD** dengan hasil tersedianya Data Ketenagakerjaan. Alokasi dana Rp 26.000.000,- Realisasi Rp 22.707.100,- (87,34 %) Ada sisa anggaran Belanja Perjalanan Luar Daerah yang tidak diambil karena berangkatnya bersama/jadi satu dengan kegiatan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja AKAD.

III. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.

1. **Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi**, melayani 48PNS Alokasi dana Rp. 115.380.000,- Realisasi Rp. 115.315.315,- (99,94%).
2. **Penyediaan bahandan jasa perkantoran**, Jumlah kebutuhan kegiatan administrasi perkantoran yang dapat dilayani. Alokasi dana Rp. 232.553.000,- Realisasi Rp 197.271.522,- (85.02 %) Ada sisa anggaran yakni dari Belanja Listrik, Air dan Telepon dikarenakan selama tahun 2016 (satu tahun anggaran) bangunan gedung/kantor Dinsosnakertrans sedang dipugar total sehingga untuk kegiatan operasional menempati gedung sementara yang tahun sebelumnya ditempati oleh Kejaksaan Negeri dimana untuk belanja listrik, air dan telepon ditanggung oleh DPPKAD.
3. **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor**, terpeliharanya sarana dan prasarana kantor seperti : kendaraan roda empat 5 unit,roda dua 20 unit, komputer 18 unit, printer 13 buah, AC 4 unit. **Alokasi** dana Rp. 257.350.000,- Realisasi Rp. 181.020.898,- (70,34 %). Ada sisa anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas karena ada penurunan harga, Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan tidak diambil karena Gedung sedang dipugar total.
4. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor**, dapat memenuhi peralatan kantor antara lain, 4 buah Almari, 1 unit sepeda motor, 1 bh laptop, 2 PC computer, 1 unit printer Alokasi dana

5. Rp.42.250.000,- Realisasi Rp. 32.908.000,- (77,89 %). Ada sisa anggaran Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Card Reader tidak dibelanjakan.
6. **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai**, meningkatkan kemampuan SDM PNS tugas-tugas yang diemban akan berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tupoksinya. Alokasi dana Rp. 7.500.000,- Realisasi Rp. 7.497.500,- (92,18 %).
7. **Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD**, pemenuhan laporan (menyusun Renja, Renstra, LKPJ) dapat dilaksanakan sebagai bukti kerja. Alokasi Dana Rp 11.845.000,- Realisasi Rp 10.919.000,- (92,18 %).
8. **Pemeliharaan TMP**, telah dilaksanakan pengecatan dan kebersihan TMP. Alokasi dana Rp. 26.816.000,- Realisasi Rp 26.259.000,- (97,92 %).

- **Urusan Pilihan Urusan Ketrasmigrasian :**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Penyiapan dan fasilitasi Transmigrasi :

1. **Fasilitasi Pemindahan Transmigrasi** dilaksanakan terhadap 10 KK ke Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Rencana target 15 KK namun quota hanya 10 KK sehingga ada anggaran yang tidak terpakai.
2. **Sosialisasi Ketrasmigrasian**, telah dilaksanakan Sosialisasi 500 orang,Desa Potensi Transmigrasi, Alokasi dana Rp. 11.589.000,- Realisasi Rp. 11.589.000,- (100 %).

Selanjutnya pencapaian standar pelayanan minimal yang dapat di capai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2016

NO	INDIKATOR SPM	CAPAIAN 2016	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	Besaran tenaga yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	67,13	269.350.000	266.350.000
2.	Besaran tenaga yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	58,45		
3.	Besaran tenaga yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	72,73	75.000.000	65.366.000
4.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	41,24	-	-
5.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	77,78	-	-
6.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	80,18	-	-
7.	Besaran pemeriksaan perusahaan	66,67	62.871.000	56.691.000
8.	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	70,00	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Isu Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Purbalingga maka dirumuskan dalam rencana program dan kegiatan yang mengacu pada permasalahan yang ada. Permasalahan atau Isu Strategis Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja.
2. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya dipahami masyarakat
3. Tingginya angka pencari kerja terdaftar karena terbatasnya lowongan kerja dan lowongan tidak sesuai dengan pasar kerja
4. Pemahaman program pemagangan masih terbatas belum sesuai dengan ketentuan/pedoman
5. Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial;
6. Masih kurangnya perlindungan hak normatif pekerja di sektor formal maupun informal .

3.2. Tujuan dan Sasaran Tahun 2018

Mendasarkan pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**. Guna mencapai visi tersebut, dilaksanakan melalui tujuh Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2016-2021 yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayahan yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari pernyataan misi tersebut, dapat disimpulkan misi yang berkaitan dimana pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu pada Misi ke 5 yaitu **Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja**".

Tujuan jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga yang ingin dicapai dari Misi ke-5 adalah **meningkatnya kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat**.

Sejalan dengan tujuan RPJMD tersebut maka **Tujuan OPD Dinas Tenaga Kerja** sesuai tugas dan tupoksinya adalah **Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja yang produktif, kompetitif dan profesional**. Untuk mencapai tujuan tersebut melalui Visi dan Misi sbb :

➤ **VISI**

Terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja yang produktif, kompetitif dan profesional

➤ **MISI**

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan perluasan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja.
2. Meningkatkan kualitas hubungan industrial yang harmonis dan terlindungi jaminan sosial.

3. Meningkatnya pelayanan transmigrasi.

Sebagaimana dikemukakan di atas Tujuan OPD Dinas Tenaga Kerja adalah Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja yang produktif, kompetitif dan profesional, maka **sasaran adalah Meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial**

Adapun Indikator Tujuan OPD adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Dan Indikator Sasaran dan target yang akan dicapai tahun 2018 yang merupakan Indeks Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Cakupan pencari kerja yang ditempatkan, target 42 %
2. Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial, target 80%
3. Rasio UMK terhadap upah di atas UMK, target 90%

Sedangkan sasaran kegiatan tahun 2018 antara lain adalah :

1. Meningkatnya ketrampilan bagi peserta pelatihan sebanyak 272 orang;
2. Mengoptimalkan keberadaan BLK berupa penyelenggaraan pelatihan-pelatihan, pengadaan sarana dan prasarana BLK dan Pembangunan Gedung Kantor yang permanen, Aula, Asrama dan tempat ibadah, kantin, renovasi workshop tata boga dll;
3. Memfasilitasi penempatan TK AKAD dan AKAN sebanyak 100 orang;
4. Memfasilitasi pertemuan antara pengguna tenaga kerja sebanyak 25 perusahaan dengan pencari kerja melalui Bursa Kerja yang akan dilaksanakan sekali dalam setahun;
5. Menyediakan data informasi ketenagakerjaan dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
6. Pemeriksaan lingkungan kerja dan kesehatan kerja di 5 perusahaan dengan peserta 300 orang;
7. Fasilitasi penguatan kelembagaan industrial perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 1000 orang
8. Fasilitasi masyarakat transmigrasi dengan menempatkan masyarakat melalui program transmigrasi sebanyak 15 KK.

3.3. Arah Kebijakan Tahun 2018

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang di tempuh adalah :

a. **Peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja :**

1. Mengoptimalkan pelatihan kerja :

a. Berbasis kebutuhan masyarakat

- Pelatihan pengolahan makanan, konveksi/garmen, potong rambut, rias manten, kerajinan, kapster salon dan lainnya.

b. Berbasis kompetensi

- Pelatihan klasikal yang berdasarkan pada kurikulum dan silabus yang telah ditentukan dengan Instruktur yang memiliki kompetensi di bidang kejuruan masing-masing seperti LAS SMAW 3G, Otomotif roda 2, Garmen Apparel, Tata Boga, TIK dan lainnya.

c. Program pemagangan ke luar negeri

- Pemagangan yang diminati saat ini adalah pemagangan ke Jepang baik di sektor pertanian, keperawatan dan IKM. Melalui 2 jalur yakni :
 - a. Program IMM (Rekrutmen melalui pemerintah);
 - b. Sending Organization (SO), melalui LPKS yang telah mendapatkan ijin dari Kemnaker RI.

2. Mengoptimalkan penempatan kerja

a. AKAL/Antar Kerja Antar Lokal untuk Purbalingga dan area Jawa Tengah;

b. AKAD/Antar Kerja Antar Daerah untuk lintas Provinsi ; pabrik tekstil, pabrik elektronik (Batam), Perkebunan Sawit (Kalimantan) dan lainnya;

c. AKAN/Antar Kerja Antar Negara untuk lintas negara (Jepang, Korea, Taiwan dan lainnya).

d. Inovasi melalui pembuatan aplikasi **Hello Work Purbalingga** yang memuat informasi tentang ketenagakerjaan dan lowongan kerja /pasar kerja yang dapat diakses secara online oleh seluruh masyarakat.

e. Penciptaan lapangan kerja melalui pekerjaan umum

- f. Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya untuk mengurangi pengangguran kurang terdidik.
- g. Mendorong pekerja sebanyak mungkin untuk melaksanakan usaha produktif dengan memanfaatkan potensi daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.

b. Mengembangkan hubungan industrial yang harmonis

- Pembinaan ke perusahaan-perusahaan terkait ketenagakerjaan

c. Peningkatan rekrutmen dan pelatihan calon transmigran

- Sosialisasi transmigrasi ke desa-desa dan fasilitasi calon transmigran yang akan diberangkatkan ke lokasi daerah transmigrasi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2018

4.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018

Untuk merealisasikan visi dan misi serta kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun program dan kegiatan.

a. Program

Program pembangunan khususnya yang ditujukan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah :

1. Program pembinaan, peningkatan ketrampilan dan penempatan Tenaga Kerja
2. Program peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan hubungan industrial.
3. Program Ketransmigrasian

Sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah diperlukan penguatan kelembagaan daerah berupa :

1. Program penguatan kelembagaan daerah.

Adapun kegiatannya adalah :

- Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja
 1. Pengembangan Gedung BLK
 2. Penyelenggaraan Pelatihan di BLK
 3. Pengelolaan Balai Latihan Kerja/BLK
 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana BLK
 5. Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja
 6. Penguatan Kelembagaan Bursa Kerja Khusus
 7. Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKAN
 8. Verifikasi dan Validasi Tenaga Kerja Asing
 9. Akreditasi dan Fasilitasi Instruktur LPKS
 10. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah/PTKD

- Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial
 1. Penguatan Kelembagaan Hubungan Industrial
 2. Pembinaan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan
- Program Ketrasmigrasian
 1. Fasilitasi Ketrasmigrasian.
- Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.
 1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.
 2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.
 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.
 5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
 6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

4.2. Pendanaan OPD

Pagu indikatif OPD Tahun 2018 : Rp 7.865.863.000,-

- Belanja OPD :

a. Rencana belanja tidak langsung : Rp 4.150.214.000,-

b. Rencana belanja langsung : Rp 3.715.649.000,-

4.3. Matrik Renja OPD Tahun 2018 (RKT Tahun 2018)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dapat dilihat dalam Matrik berikut ini.

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2019	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B E L A N J A				7.865.863.000	-	-	-	8.280.884.0000
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG				4.150.214.000				4.565.235.000
II. BELANJA LANGSUNG				3.715.649.000	-	-	-	3.715.649.000
A. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat daerah				604.649.000				604.649.000.000

1	Penyediaan dan Perkantoran	Bahan dan Jasa	Jumlah kebutuhan kegiatan administrasi perkantoran yang dapat dilayani	Kab. Pbg.	Terlayannya administrasi perkantoran selama 12 bulan, 32 PNS, honorarium pengelolaan keuangan PNS, honor tenaga harian lepas, listrik (naik dari tahun sebelumnya), air, internet, telepon, makan minum rapat, jamuan tamu, bendera umbul-umbul, penggandaan, peralatan kebersihan, alat listrik, perlengkapan rumah tangga dll	270.070.000	DAU		Terlayannya administrasi perkantoran selama 12 bulan, 32 PNS, honorarium pengelolaan keuangan PNS, honor tenaga harian lepas, listrik (naik dari tahun sebelumnya), air, internet, telepon, makan minum rapat, jamuan tamu, bendera umbul-umbul, penggandaan, peralatan kebersihan, alat listrik, perlengkapan rumah tangga dll	381.000.000
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah pegawai yg ada dapat dibiayai melalui kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Pbg.	Rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan oleh 32 PNS	84.000.000	DAU		Rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan oleh 32 PNS	120.000.000

3	Pemeliharaan Sarpras Kantor	Jumlah Sarpras yang terpelihara selama 12 bulan	Kab. Pbg.	Terpeliharanya sarpras selama 12 bulan, servis, suku cadang, BBM, STNK, Bea Balik Nama, Pemeliharaan gedung, jaringan telepon, komputer	160.579.000	DAU		Terpeliharanya sarpras selama 12 bulan, servis, suku cadang, BBM, STNK, Bea Balik Nama, Pemeliharaan gedung, jaringan telepon, komputer	270.000.000
4	Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan dapat memenuhi kebutuhan kantor	Kab. Pbg.	Motor Roda Dua (2), Mebelair (meja kerja, meja rapat (51), kursi rapat, kursi pelatihan/kuliah (50), tiang bendera ruangan, papan nama antar ruang, AC, Laptop Komp PC (6), printer, CCTV (8 titik), Almari Arsip (2), Gordyn, Papan Pengumuman Lowongan Kerja, Kelengkapan Rumah Tangga, kursi tunggu pelayanan dan jaringan telapon, Kipas angin	60.000.000	DAU	Dasar : Instruksi Bupati pada saat kunjungan ke Gedung Baru Dinnaker pada tgl 16 Jan. 2017 (Nota Dinas agar ditujukan kpd Bupati utk pengajuan kebutuhan sarpras pelayanan kpd masyarakat		387.000.000

					blower, penghancur kertas, tangga besi					
	5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pegawai secara bertahap akan di diklat	Kab. Pbg.	Diklat sampai menunjang kemampuan tugas sebagai PNS sebanyak 15 PNS	20.000.000	DAU		Diklat sampai menunjang kemampuan tugas sebagai PNS sebanyak 15 PNS	20.000.000
	6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah pelaporan dise- suaikan dengan kebutuhan pelaporan	Kab. Pbg.	Pemenuhan laporan dapat dilaksanakan sebagai bukti kerja	10.000.000	DAU		Pemenuhan laporan dapat dilaksanakan sebagai bukti kerja	6.000.000
	B. Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja					2.496.000.000				2.496.000.000
	1	Pembangunan Sarana BLK (Aula, dan Tempat Ibadah)	Meningkatnya jumlah sarana prasana untuk pelayanan / operasional BLK	Kab. Pbg.	Pengad. Gedung Asrama (2 lantai, kapasitas 64 orang, 16 kamar), Tempat Ibadah, Gedung Aula, Bangunan Parkir roda empat, Renovasi workshop tata boga (termasuk kantin)	1.400.000.000	DAU			1.400.000.000 -

2	Penyelenggaraan Pelatihan di BLK (DBH-CHT)	Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih ketrampilan sesuai kebutuhan pasar dan tenaga mandiri	Kab. Pbg.	Pelatihan : 1. Otomotif 16 org 2 pkt 2. Las/Welder 16 org 2 pkt 3. Menjahati 16 2 pkt 4. Tata Boga 16 org 4 pkt 5. Teknik Informatika Komputer 16 org 2 pkt	392.500.000	DBH-CHT	Untuk Program magang Jepang peserta akan di asramakan.	Pelatihan : 1. Otomotif 16 org 2 pkt 2. Las/Welder 16 org 2 pkt 3. Menjahati 16 2 pkt 4. Tata Boga 16 org 4 pkt 5. Teknik Informatika Komputer 16 org 2 pkt	392.500.000
3	Pengelolaan Balai Latihan Kerja / BLK	Terpenuhinya kebutuhan operasional BLK	Kab. Pbg.	~Membayar THL (kebersihan 7 org x 12 bln, keamanan 2 x 12, adm/operator komp 3 x 12, Toolman 5 x 12)	280.000.000	DAU		~Membayar THL (kebersihan 7 org x 12 bln, keamanan 2 x 12, adm/operator komp 3 x 12, Toolman 5 x 12)	280.000.000
				~Belanja ATK, Benda Pos, Kebutuhan RT berupa Alat Listrik, Alat kebersihan, Gas					
				~Belanja Telephon, Air, Listrik, Kawat/Faximil dan Internet.					

				<p>~ Belanja Dokumentasi, Publikasi Fotokopi dan Penggandaan</p> <p>~Makan Minum Rapat / Jamuan Tamu</p> <p>~Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah</p> <p>~Belanja Pemeliharaan Gedung, Peralatan kantor, Peralatan Workshop</p> <p>~Belanja Jasa Konsultasi dan Pengawas</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					~Belanja MODAL Pengadaan Gedung tempat kerja/kantor, Pengadaan alat kantor, Pengadaan alat pendingin.AC, , Pengadaan Alat Elektronik : Camera DLSR dan Televisi IED					
4	Pengadaan Sarpras BLK	Terpenuhinya kebutuhan Aula, Asrama dan Tempat Ibadah	Kab. Pbg.	Pengadaan Peralatan Bengkel, Alat Rumah tangga, Peralatan Studio Visual, Kursi Rapat/Kuliah, Tempat Tidur, Karpas Sajadah, Kantin, Jense dll.	150.000.000	DAU		Pengadaan Peralatan Bengkel, Alat Rumah tangga, Peralatan Studio Visual, Kursi Rapat/Kuliah, Tempat Tidur, Karpas Sajadah, Kantin, Jense dll.	150.000.000	
5	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah calon tenaga kerja yang terlatih	Kab. Pbg.	Calon tenaga kerja yang dilatih 80 orang	67.500.000	DBH- CHT	Masing2 peserta akan mendapatkan bantuan peralatan	Calon tenaga kerja yang dilatih 80 orang	67.500.000	
6	Penguatan Kelembagaan Bursa Kerja Khusus	Terpeliharanya Hubungan Kelembagaan Bursa Kerja Khusus	Kab. Pbg.	Terselenggaranya hubungan kelembagaan sebanyak 25 BKK	60.000.000	DAU		Terselenggaranya hubungan kelembagaan sebanyak 25 BKK	60.000.000	

7	Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKAN Penyelenggaraan Pelatihan di BLK	Jumlah TK AKAD dan AKAN setelah diseleksi dapat difasilitasi Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih ketrampilan sesuai kebutuhan pasar dan tenaga mandiri	Kab. Pbg.	Tenaga kerja AKAD dan AKAN ditempatkan masing2 100 org	50.000.000	DAU		Tenaga kerja AKAD dan AKAN ditempatkan masing2 100 org	50.000.000
8			Kab. Pbg.	Pelatihan : 1. Otomotif 16 org 2 pkt 2. Las/Welder 16 org 2 pkt 3. Menjahati 16 2 pkt 4. Tata Boga 16 org 4 pkt 5. Teknik Informatika Komputer 16 org 2 pkt	392.500.000	DBH-CHT	Untuk Program magang Jepang peserta akan di asramakan.	Pelatihan : 1. Otomotif 16 org 2 pkt 2. Las/Welder 16 org 2 pkt 3. Menjahati 16 2 pkt 4. Tata Boga 16 org 4 pkt 5. Teknik Informatika Komputer 16 org 2 pkt	392.500.000
9	Verifikasi dan Validasi Tenaga Kerja Asing	Jumlah TKA yang terdata dan terkini (up to date) 65 TKA	Kab. Pbg.	Pembentukan Tim dan Operator	35.000.000	DAU			35.000.000
10	Akreditasi dan Fasilitasi Instruktur				31.000.000				31.000.000
11	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah /PTKD	Tersedianya informasi dan data ketenagakerjaan	Kab. Pbg.	Penyusunan Buku PTKD	30.000.000			Penyusunan Buku PTKD	20.000.000

C.	Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial			660.000.000	-	-	660.000.000
1	Pembinaan kelembagaan hubungan industrial	Jumlah kelembagaan HI di perusahaan yang difasilitasi melalui kegiatan pemberdayaan kelembagaan HI	Pembinaan Kelembagaan HI 60 perusahaan, Pembinaan Serikat Pekerja 50 org, Pembinaan APINDO 50 org, Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan 100 prush. 1. Senam Bersama 2. Lomba Karaoke 3. Lomba Memasak 4. Pertand. Sepak Bola perempuan 5. Pertand. Badminton 6. Sarasehan tenaga kerja dan pengusaha 7. Resepsi dengan peserta 1000 orang	220.000.000		Pembinaan Kelembagaan HI 60 perusahaan, Pembinaan Serikat Pekerja 50 org, Pembinaan APINDO 50 org, Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan 100 prush. 1. Senam Bersama 2. Lomba Karaoke 3. Lomba Memasak 4. Pertand. Sepak Bola perempuan 5. Pertand. Badminton 6. Sarasehan tenaga kerja dan pengusaha 7. Resepsi dengan peserta 1000 orang	220.000.000

	2	Pembinaan Pengupahan dan kesejahteraan pekerja perusahaan	survey KHL, rapat2 dewan pengupahan	Kab. Pbg.	Survey 3 pasar besar, Sosialisasi UMK dan Struktur Skala Upah, Pemantauan UMK dan THR di persh,	140.000.000	DAU		Survey dilaksanakan di 3 pasar setiap tahunnya 7 kali masing-masing pasar	140.000.000
			Terpenuhinya sarana kesejahteraan di perusahaan	Kab. Pbg.	60 perusahaan agar dapat memenuhi sarana prasarana untuk kesejahteraan pekerja di perusahaan, contoh tempat ibadah, kantin /tempat makan, sarana olahraga, koperasi pekerja, transportasi, klinik, kepesertaan BPJS, dll.		DAU		60 perusahaan agar dapat memenuhi sarana prasarana untuk kesejahteraan pekerja di perusahaan, contoh tempat ibadah, kantin /tempat makan, sarana olahraga, koperasi pekerja, transportasi, klinik, kepesertaan BPJS, dll.	

D.	Program Ketransmigrasian								255.000.000
	1	Fasilitasi Ketransmigrasian	Jumlah masyarakat yang terfasilitasi transmigrasi	Kab. Pbg.	Sosialisasi ketransmigrasian 20 desa, Rekrutmen, seleksi dan pelatihan calon transmigran, Cek Lokasi transmigrasi, Pengadaan Perbekalan serta Pendampingan penempatan bagi calon transmigran	255.000.000	DAU	Sosialisasi ketransmigrasian 20 desa, Rekrutmen, seleksi dan pelatihan calon transmigran, Cek Lokasi transmigrasi, Pengadaan Perbekalan serta Pendampingan penempatan bagi calon	255.000.000

BAB V
PENUTUP.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bagian dari awal proses fungsi manajemen. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan akan tergantung pula pada proses fungsi manajemen lainnya, yaitu kualitas perencanaan pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan. Namun demikian paling tidak penyusunan rencana yang baik akan sangat membantu kelancaran dan keberhasilan suatu kegiatan. Dalam kerangka itulah rencana kerja ini disusun secara bertahap agar dapat membantu terwujudnya visi Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga , Januari 2017

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PURBALINGGA



Dr. GUNARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590811 198503 1 016